

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN
JUMLAH PENDUDUK (JP) TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI
KASUS PROVINSI SE-INDONESIA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPER
OLEH GELAR MAGISTER STRATA DUA
DALAM ILMU EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

FAISAL HIDAYAT

NIM. 1620311045

PEMBIMBING:

Dr. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFL., M.Ag

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Dalam era desentralisasi fiskal, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor lainnya untuk menanamkan investasinya di daerah. Pemerintah daerah sebagai investor mewakili negara dalam menyediakan berbagai prasana dan sarana dibutuhkan, hal demikian dilakukan melalui belanja modal. Dengan mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal di dalam APBD untuk menambah aset tetap. Sehingga, komposisi belanja dalam APBD perlu diubah oleh pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap. Langkah yang dilakukan karena selama ini belanja daerah cenderung dipergunakan untuk membiayai belanja rutin yang kurang produktif, sehingga penyerapan anggaran belanja modal rendah, mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik. Jika keuangan daerah dikelola dengan baik maka akan berpengaruh pada kemandirian dan kemajuan suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Alokasi Belanja Modal. Objek dalam penelitian ini adalah 13 Provinsi di Indonesia selama tahun 2013-2017. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD antara tahun 2013-2017. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi panel berganda dengan program Eviews 10.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif pada alokasi Belanja Modal. Sedangkan variabel Jumlah Penduduk tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Jumlah Penduduk, Belanja Modal

Abstract

In the era of fiscal decentralization, the improvement of services in various sectors, particularly public sector, is expected. The improvement of services in public sector will increasingly attract investors to invest in regions. As an investor, the regional government represents the country in providing infrastructures and facilities needed through a capital expenditure. By allocating the capital expenditure in the Regional Government Budget (APBD), fixed assets will increase. Therefore, to increase public trust, it is important for the regional government to revise the cost of spending in APBD through the improvement of fiscal investment in the form of fixed assets. All this time, the regional government tends to spend the Regional Government Budget for routine expenditures which are less productive, causing a low absorption of capital expenditure budget. This can be seen as a reflection of poor regional financial management. If regional finances are managed properly, it will affect regional independence and development.

This study aims to examine and reveal empirical facts that support Region Own-Source Revenue, General Allocation Fund (DAU), Financing Surplus (SILPA) and Total Population (JP) for Capital Expenditure Budget. The objects in this study were 13 provinces in Indonesia during 2013-2017. The data source of the research used is secondary data in the form of APBD realization reports between 2013-2017. Data analysis techniques used is multiple panel analysis with programs *Eviews 10*. The results of this research indicate that the variable Region Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Financing Surplus (SILPA) have positive impacts towards Capital Expenditure Budget. While the Total Population do not have any positive impacts to the Capital Expenditure Budget.

Keywords: Region Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Financing Surplus, Total Population, Capital Expenditure.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Sdr. Faisal Hidayat
Lamp : 1
Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faisal Hidayat
NIM : 1620311045

Judul Tesis: "PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU),
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN JUMLAH
PENDUDUK (JP) TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI
KASUS PROVINSI SE-INDONESIA)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua dalam Ekonomi Syariah. Dengan ini kami mengharap agar Tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Pembimbing

Dr. M. Syafiq Mahmadah., M.Ag
NIP : 19670518 199703 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-3079/Un.02/DEB/PP.00.9/11/2018

Tugas akhir dengan judul : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Jumlah Penduduk (JP) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus 13 Provinsi di Indonesia)"

Yang dipersiapkan dan di susun oleh:

Nama : Faisal Hidayat
NIM : 1620311045
Telah diajukan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai : A-
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji I

Dr. Sunaryati, S.E., M.Si
NIP. 19751111 200212 2 002

Penguji II

Dr. Ibi Satibi, S.HL., M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011

Yogyakarta, 22 November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Hidayat

NIM : 1620311045

Prodi : Magister Ekonomi Syaria'h

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN JUMLAH PENDUDUK (JP) TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS 13 PROVINSI SE-INDONESIA TAHUN 2013-2017)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018 M
Penyusun,



Faisal Hidayat
NIM. 1620311045

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Faisal Hidayat
NIM : 1620311045
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Kapalo Koto Pd.Pariaman Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menerbitkan Tesis ke dalam Jurnal yang tersitasi Standard DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), guna memenuhi salah satu syarat Ujian Tugas Akhir/Tesis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Hormat saya,



Faisal Hidayat
NIM. 1620311045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu	ditulis	<i>ū</i>
mati	ditulis	

فروض		<i>furūd</i>
------	--	--------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari al-Qur'an dan mengamalkannya (Hadist Nabi)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk seorang wanita yang kasihnya tiada dua, do'a dan ridhonya menjadi tameng menghadapi dunia, Mama terhebat Desnita Devi, dan seorang lelaki yang tak mau menampakkan sedikitpun masalah yang sedang ia hadapi, Papa Alimin terkasih. Terimakasih sudah mendidik, mendo'akan serta mengupayakan yang terbaik pada semua anak-anaknya.

Pada Kakak yang selalu memantau adiknya; Elok Ira Dessylia, S.Pd, Kakak Ramdhani Yamin, S.Pd, Uda Faiz Fauzan, dan Abangda Munawaratul Ilmi. Terimakasih atas perhatian dan bimbingannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa shawalat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Strata II Program Studi Magister Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, pihak-pihak tersebut adalah:

- 1) Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga tesis ini selesai.
- 3) Bapak Dr. Minen Ardiansyah, S.E., M.Si., AK., CA selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4) Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si dan Ibu Dr. Sunaryati, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan tesis ini.
- 5) Bapak Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
- 6) Prof. Dr. dr. Hardyanto, Sp.KK (K), Dr. dr. Soenardi Radiono, Sp.KK (K), dr. Rusnawi, Sp.KK, dr. Diana R, dr. Tara yang selalu saya repotkan saat raga butuh asupan medis.
- 7) Kedua orang tua yaitu Papa Alimin dan Mama Desnita Devi yang selalu memberi semangat.

- 8) Abdul Basith Fuadi, S.H., M.H, Sirajul Afkar, S.Pd.I, satu dekade mengenal kalian, berproses bersama, terimakasih sudah mau direpotkan dan merepotkan. Kalian berdua, terbaik memang.
- 9) Pada rekan seperjuangan Muhammad Afif, Adhiyaksa JP, Zikrullah, M.Luqman Hakim angkatan 15 PPM Subulussalam. Terimakasih sudah menemani saya untuk berani bermimpi dan wujudkannya.
- 10) Teman-teman seperjuangan di kelas Ekonomi Syariah Angkatan 2016 Prodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 11) Teman-teman seperjuangan di Pesantren Properti Indonesia, Dr. H. Ony Wijaya, S.T., S.H., S.E., M.Kn., M.M , Darmawan Rizky, S.Ds. , teman angkatan 11 dan angkatan lainnya utamanya pada Pak Ir. H. Bambang Ifnuruddin. Yang mmemberi kesempatan saya belajar di sana.
- 12) Teman Kost Muslim Institute; Azis, Dimas, Fauzan, Fauzi, Iqbal, dan Misbah terimakasih atas kebersamaan dan ilmunya.
- 13) Urang awak yang di Jogja, Abangda Edward Bot, Uni Fika, Uni Rika, JAMAYYKA, IMAMI
- 14) Elfast Chapter Jogja, MN Ihsan, Aulia Pratama, calon mahasiswa STAN 2017-2019 MN Fajriadi
- 15) Terakhir, pada wanita yang padanya harapan dilabuhkan Miftahurrahmah S.E.I , M.Si terimakasih supporter terhebat.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Faisal Hidayat
NIM. 1620311045

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	 13
A. Teori Sistem	13
B. Teori Keagenan	14
C. Anggaran Daerah dalam Prepektif Islam	21
D. Belanja Modal	25
E. Pendapatan Asli Daerah	32
F. Dana Alokasi Umum	36
G. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	38
H. Jumlah Penduduk	39
I. Penelitian Terdahulu	40
J. Hipotesis	44
K. Kerangka Pemikiran	48
 BAB III METODE PENELITIAN	 48
A. Jenis Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Definisi Operasional Variabel	51
E. Metode Analisis	51
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	 59
A. Deskripsi Objek Penelitian	59
B. Analisis Statistik Deskriptif	69
C. Estimasi Pemilihan	72

D. Pembahasan.....	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Implikasi.....	89
C. Keterbatasan	90
D. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Belanja Modal	3
Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah	4
Gambar 3. Dana Alokasi Umum	6
Gambar 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	7
Gambar 5. Organisasi Sistem	13
Gambar 6. Kerangka Pemikiran.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Belanja Modal	28
Tabel 2.2 Telaah Pustaka	42
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	50
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Aceh	60
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Sumut	60
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Riau	61
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Jabar	62
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran Jatim	62
Tabel 4.6 Laporan Realisasi Anggaran Banten	63
Tabel 4.7 Laporan Realisasi Anggaran NTB	64
Tabel 4.8 Laporan Realisasi Anggaran NTT	65
Tabel 4.9 Laporan Realisasi Anggaran Kalbar	66
Tabel 4.10 Laporan Realisasi Anggaran Sulut	66
Tabel 4.11 Laporan Realisasi Anggaran Sultra.....	67
Tabel 4.12 Laporan Realisasi Anggaran Gorontalo	68
Tabel 4.13 Laporan Realisasi Anggaran Papua	69
Tabel 4.14 Analisis Deskriptif	70
Tabel 4.15 Pemilihan Model	72
Tabel 4.16 Hasil Regresi Data Panel.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Negara tentang desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu indikasi utama perubahan yang tentunya dalam kerangka penguatan keutuhan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut adalah, terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumberdan potensi yang ada didaerah yang merupakan tantangan dan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan pembangunan. (Soeradi, 2014:1)

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah provinsi ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar, 2012 :3)

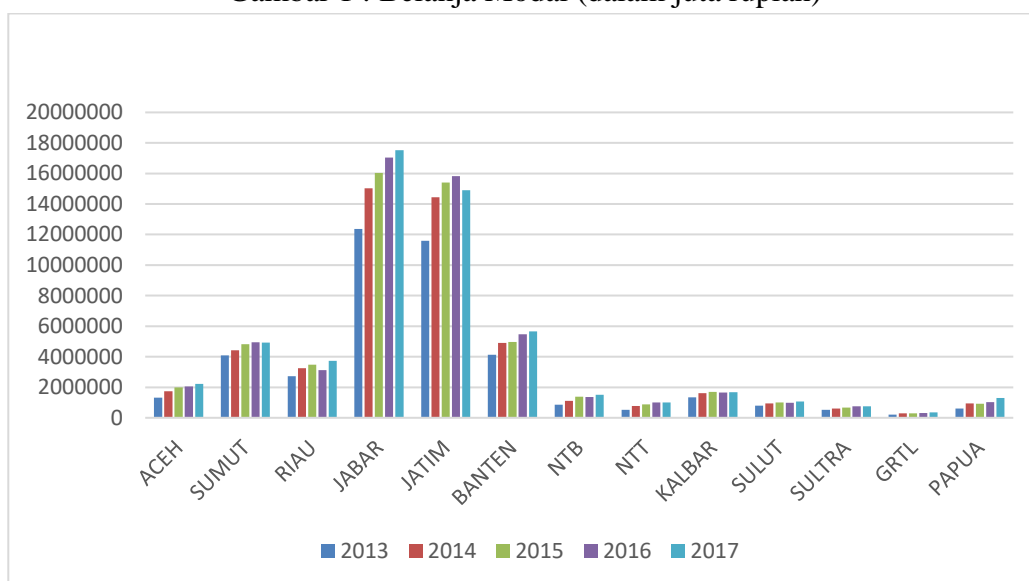
Dalam era desentralisasi fiskal sekarang, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Syukriy, 2012). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber daya daerahnya (Basri, 2012:177). Potensi daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan anggaran belanja daerah.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi

belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Berikut Belanja Modal semua Provinsi :

Gambar 1 : Belanja Modal (dalam juta rupiah)

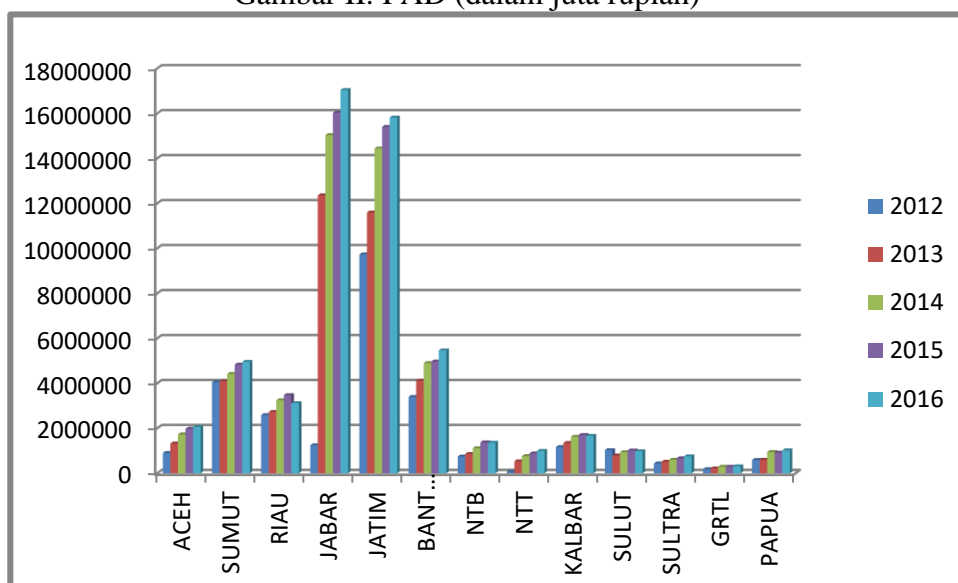


Sumber : [Keuda Kemendagri, 2017](#) (Diolah)

Belanja modal terdapat tercapai dalam perumusan dan perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada prakteknya Belanja modal masih belum ideal.

Semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia tentunya akan membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintahan pusat yang semakin besar. Sementara pemenuhan kebutuhan minimal akan belanja daerah yang ada sendiri masih belum memberikan hasil kinerja seperti yang diharapkan, disamping banyak terjadi kebocoran-kebocoran. Oleh karena itu, sebagai gambaran pendapatan asli daerah (PAD) Pada tahun 2012-2016.

Gambar II: PAD (dalam juta rupiah)



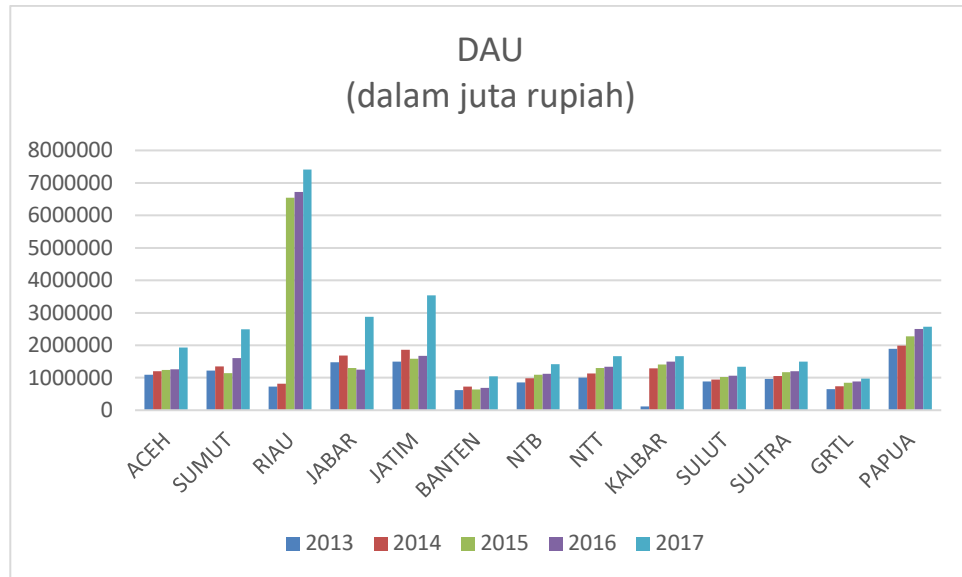
Gambar II Pendapatan Asli Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (Diolah)

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Syukriy, 2012). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

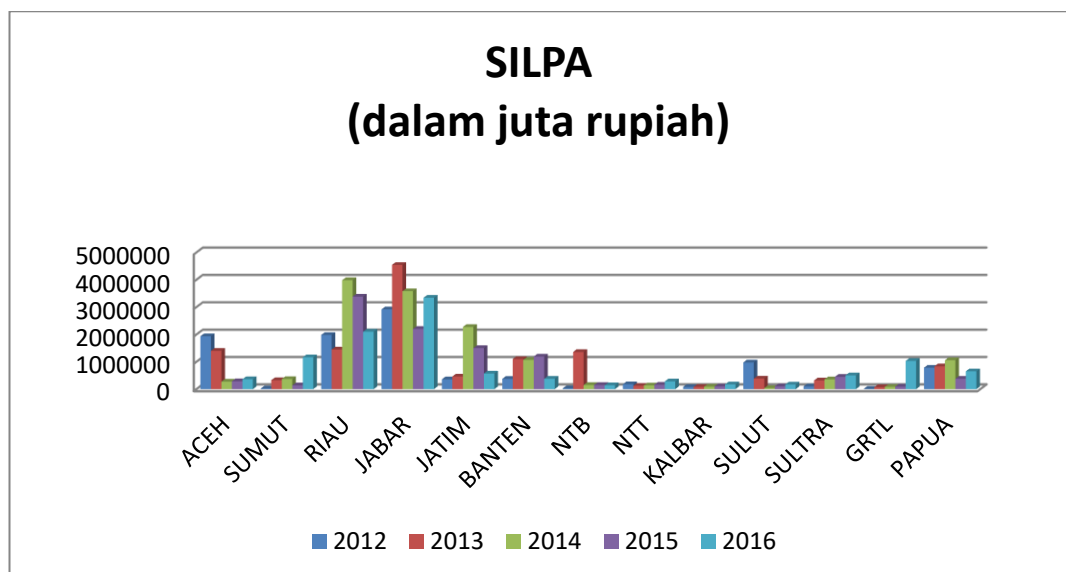
Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 salah satunya adalah Dana Alokasi Umum, berikut data Jumlah Dana Alokasi Umum pada tahun 2017.



Gambar III : Jumlah DAU Perprovinsi (BPS; diolah)

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam data Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), ada beberapa Provinsi yang menyisakan SiLPA hampir dari separuh dari anggarannya.



Gambar IV. Jumlah SILPA (Keuda Kemdagri, Diolah)

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal ataupun otonomi daerah ialah agar tercapainya kesejahteraan bagi seluruh penduduk yang ada pada negara Indonesia, utamanya yang ada pada daerah yang masyarakat tempati. Karena hal demikian merupakan instrumen dasar penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesiamencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen) (bps.go.id, diakses 29 Maret 2018).

Dalam mewujudkan desentralisasi tersebut, juga memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sukarna, 2013:9). Dengan adanya pemberian otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa setiap daerah diharuskan sanggup memenuhi kebutuhan semua kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan publik fasilitas yang menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah diarahkan untuk bisa dalam mengelola penerimaan daerahnya sendiri yang ditunjukkan untuk pembangunan perekonomian daerah. Peningkatan desentralisasi berkaitan dengan bagaimana daerah mampu dalam menggali penerimaan atau pemasukan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagian dari pemasukan daerah yang digali dari sumber daya yang tersedia di daerah yang tidak termasuk dana perimbangan dan penerimaan lainnya.

Pada pelaksanaan desentralisasi, peran pemerintah tidak lepas tangan. Pemerintah Pusat dalam perannya memajukan dan memakmurkan masyarakat

ialah memberi dana perimbangan, salah satu dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah adalah Dana Alokasi Umum.

Studi yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal, sementara PAD tidak. Temuan yang sama juga pada penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Kusnandar (2012), Syukriy (2012).

Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh pada alokasi belanja modal tahun berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Semenjak diberlakukanya otonomi daerah, kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri menjadi keharusan yang tidak didapat dihindari lagi. Maka upaya daerah untuk menjalankan pemerintahan yang baik ialah dengan mengatur keuangan daerah sendiri, demi terwujudnya pembangunan daerah yang baik tentu daerah perlu memaksimalkan potensi yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
- c. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
- d. Apakah Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah ada, Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menjelaskan pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
- b. Untuk Menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- c. Untuk Menjelaskan pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal
- d. Untuk Menjelaskan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Modal

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti tentang ekonomi publik, khususnya mengenai Belanja Modal.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Jumlah Penduduk (JP), dan Belanja Modal.
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah dalam membuat kebijakan untuk Belanja Modal
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ekonomi publik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Latar belakang ini menjadi masukan bagi terbentuknya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini.

Bab II Telaah Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasional dari variabel-variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian melalui gambaran umum obyek penelitian serta menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan data dengan analisis regresi linear .

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran baik untuk pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu menaikkan belanja modal.
2. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum mampu menaikkan belanja modal.
3. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mampu menaikkan belanja modal.
4. Penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Indonesia. Hal ini

mengindikasikan bahwa jumlah belanja modal tidak tergantung berdasarkan jumlah penduduk yang ada.

5. Secara simultan PAD, DAU, SILPA, JP berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi Indonesia.

B. Implikasi

Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Modal memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian PAD, DAU, dan SILPA sebaiknya dialokasikan pada belanja modal yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur sehingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
2. Dari hasil penelitian JP diperoleh tidak signifikan, pengelolaan keuangan yang baik harusnya bisa menekan angka sisa lebih pembiayaan anggaran demi kesejahteraan penduduk.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengelolaan keuangan daerah kedepannya, khususnya dalam penganggaran belanja modal. (masukkan pengertian belanja modal).

C. Keterbatasan

Pada penelitian ini ditemui beberapa keterbatasan diantaranya ialah nilai R^2 pada penelitian ini sebesar 0,5193 hal inimebuktikan bahwa hanya 51,93 persen variasi variabel Belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Jumlah Penduduk (JP), sedangkan sisanya 48,07 persen dijelaskan oleh variasi lain diluar model penelitian.

Periode waktu yang digunakan hanya lima tahun yaitu dari tahun 2013-2017. Untuk tahun dan provinsi lainnya dibutuhkan informasi yang valid.

D. Saran

1. Pemerintah harus bisa mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan baik, sebaiknya PAD dan DAU dialokasikan pada belanja modal yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur sehingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
2. Kepada Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tema yang sama, diharapkan menambahkan variabel yang lebih besar untuk memperbesar nilai (R^2), karena dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas yaitu : PAD, DAU, SILPA dan JP maka diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan data yang lebih lengkap, menambahkan variabel lainnya dan variabel kontrol.
3. Kepada Masyarakat, tujuan utamanya dari alokasi belanja modal adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat itu sendiri, maka diperlukan kontrol yang bagus juga dari masyarakat guna terwujudnya tujuan tersebut.